

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Preferensi Politik

Preferensi politik merupakan suatu kecenderungan pilihan politik individu yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diyakini dan melekat dalam diri seseorang, sehingga mendorongnya untuk memberikan respons terhadap situasi politik yang dihadapinya (Ekehammar & Sidanius, 2018). Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk cara pandang politik seseorang, tetapi juga mempengaruhi tindakan politik yang akan diambil. Dengan demikian, preferensi politik memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi salah satu faktor penentu dalam mengarahkan perilaku dan sikap politik individu di tengah dinamika kehidupan politik.

Secara etimologis, istilah “preferensi” mengacu pada keputusan atau pilihan yang diambil seseorang di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dalam konteks ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan ekonomi, preferensi digunakan untuk mengukur tingkat minat, kesukaan, atau kecenderungan terhadap suatu pilihan. Menurut Kotler & Armstrong (2014) dalam Sholihah & Wulansari (2023), preferensi adalah penunjuk pilihan seseorang dari sekian banyak opsi yang tersedia, baik dalam situasi nyata maupun hipotetis. Konsep ini penting karena dapat digunakan untuk meneliti tingkat kesenangan atau kepuasan yang diharapkan seseorang dari suatu pilihan. Misalnya, jika seorang individu ingin memanfaatkan

layanan atau sumber daya tertentu, ia akan memilih alternatif tindakan yang diyakini dapat memberikan manfaat atau utilitas tertinggi baginya (Salim, 2022)

Porteus (dalam literatur perilaku politik) mendefinisikan preferensi sebagai salah satu komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa preferensi terbentuk melalui interaksi beberapa unsur, yaitu persepsi, nilai, kecenderungan, dan kepuasan (Harahap, 2016). Keempat komponen ini saling memengaruhi satu sama lain sehingga membentuk keputusan akhir yang diambil oleh individu. Dalam konteks politik, preferensi tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam hubungannya dengan pemilihan umum, preferensi politik masyarakat sering kali terbentuk melalui akumulasi pengalaman yang mereka peroleh dari kehidupan sosial dan politik sehari-hari. Masyarakat yang pernah mengalami dampak kebijakan tertentu dari pemerintah, baik positif maupun negatif, akan membangun pandangan politik berdasarkan pengalaman tersebut. Sementara itu, faktor kepercayaan turun-temurun yang diwariskan dari keluarga atau komunitas juga memiliki pengaruh kuat, khususnya dalam lingkungan masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, agama, atau ideologi tertentu (Putra, 2023).

Preferensi politik yang dimiliki seseorang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk tindakan politik. Namun, bentuk tindakan ini tidaklah seragam antara satu

individu dengan individu lainnya. Perbedaan tersebut muncul karena tindakan politik bergantung pada nilai-nilai politik yang menonjol pada diri seseorang pada saat tertentu (Belitung, 2019). Dalam banyak kasus, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk motivasi dan minat politik. Misalnya, seseorang yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial mungkin akan lebih cenderung memilih kandidat atau partai politik yang mengusung program pemerataan kesejahteraan.

Selain faktor internal, karakteristik geografis dan lingkungan tempat individu tinggal juga dapat mempengaruhi preferensi politik. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi wilayah, tingkat pendidikan masyarakat, interaksi sosial, dan infrastruktur politik di daerah dapat membentuk kecenderungan politik tertentu. Namun, pengaruh faktor geografis ini sering kali disaring atau dimodifikasi oleh keyakinan individu, seperti ideologi politik, agama, budaya, atau nilai ekonomi. Dalam beberapa kasus, faktor lingkungan justru memperkuat preferensi yang sudah ada sebelumnya.

Dalam kajian perilaku memilih (*voting behavior*), salah satu model yang sering digunakan adalah model pilihan rasional (*rational choice model*). Model ini berasumsi bahwa pemilih bertindak untuk memaksimalkan manfaat yang mereka harapkan dari keputusan politik yang diambil. Pemilih yang berorientasi pada pilihan rasional biasanya mengandalkan informasi terkini yang mereka miliki dan memproyeksikan dampak jangka panjang dari pilihannya, tanpa terlalu mempertimbangkan pengalaman masa lalu atau pilihan sebelumnya (Rojek, 1973). Proses ini mencerminkan sikap pragmatis, di mana pertimbangan utama bukan

hanya ideologi atau loyalitas partai, tetapi keuntungan nyata yang akan diperoleh setelah keputusan politik diambil.

Rasionalisasi pilihan politik sendiri merupakan proses penggunaan logika dan pertimbangan objektif oleh individu untuk menentukan tindakan politik yang sesuai dengan kondisi nyata (*realitas politik*) yang sedang berlangsung. Proses ini menuntut kemampuan untuk memprediksi manfaat atau konsekuensi dari suatu keputusan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemilih yang mengandalkan rasionalisasi biasanya memperhitungkan peluang keberhasilan dan risiko yang mungkin dihadapi sebelum memutuskan untuk mendukung partai atau kandidat tertentu (Madiun, 2018).

Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku memilih rasional sering kali sulit terwujud secara ideal (Salim, 2022). Tingkat pendidikan yang masih rendah, keterbatasan akses terhadap informasi politik, dan minimnya literasi politik menyebabkan sebagian besar masyarakat membuat pilihan politik berdasarkan faktor emosional atau ikatan identitas, seperti kedekatan etnis, agama, atau loyalitas keluarga terhadap partai tertentu. Kondisi ini sejalan dengan fenomena di berbagai negara berkembang, di mana status sosial-ekonomi sering kali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku politik.

Dalam konteks global, pola preferensi politik juga kerap dipengaruhi oleh kelas sosial. Misalnya, di beberapa negara Eropa, kelompok berpenghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung mendukung partai-partai berhaluan kiri seperti Partai Sosialis atau Partai Komunis, sedangkan kelas menengah dan atas lebih banyak

memberikan dukungan pada partai berhaluan konservatif. Di Amerika Serikat, Sherman & Kolker dalam tulisan Ramadhan & Ridwan, (2024) menemukan bahwa kelas pekerja melalui organisasi buruh umumnya mendukung Partai Demokrat, sedangkan kelas menengah-atas lebih condong pada Partai Republik.

Meskipun demikian, rasionalisasi politik pada akhirnya tetap berkaitan erat dengan preferensi politik. Unsur pragmatisme politik dapat muncul ketika seseorang meyakini bahwa partisipasinya dalam aktivitas politik akan memberikan manfaat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor identifikasi kepartaian, orientasi terhadap isu, dan orientasi terhadap kandidat menjadi landasan dalam proses rasionalisasi ini. Dalam pendekatan psikologis, identifikasi kepartaian lebih banyak didorong oleh aspek emosional, sedangkan orientasi terhadap isu dan kandidat memerlukan kapasitas kognitif politik yang lebih tinggi.

Dengan demikian, preferensi politik bukan hanya hasil dari pilihan spontan, tetapi merupakan produk interaksi yang kompleks antara faktor internal (nilai, pengalaman, motivasi) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, kondisi ekonomi, budaya politik). Pemahaman yang komprehensif mengenai preferensi politik sangat penting, karena akan membantu menjelaskan perilaku memilih masyarakat, baik dalam konteks pragmatis maupun ideologis, serta memberikan gambaran tentang dinamika politik di suatu Negara.

2.1.2. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih merupakan bagian integral dari studi perilaku politik yang secara khusus membahas tindakan individu atau kelompok dalam kaitannya dengan

proses pemilihan umum (pemilu). Menurut Plano, (1996) perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang bersifat terbuka (*overt political behavior*), artinya dapat diamati secara langsung melalui tindakan nyata, seperti kehadiran di tempat pemungutan suara atau keterlibatan dalam kampanye politik.

Huntington dan Nelson (1990:121) dalam tulisannya Bisri (2012) memandang perilaku memilih sebagai bagian dari *electoral activity*, yaitu serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan proses pemilu. Aktivitas ini meliputi pemberian suara (*voting*), membantu kegiatan kampanye, bekerja dalam penyelenggaraan pemilu, melakukan persuasi untuk mendukung calon tertentu, atau bentuk-bentuk kegiatan lain yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Dari perspektif ini, perilaku memilih tidak hanya mencakup tindakan teknis saat hari pemungutan suara, tetapi juga seluruh rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan politis dalam konteks elektoral.

Dalam penelitian ini, pembahasan perilaku memilih difokuskan pada makna yang lebih sempit, yaitu perilaku memilih dalam proses pemberian suara (*voting*) pada sebuah pemilihan gubernur. *Voting* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan politik yang dilakukan dengan prinsip “satu orang, satu suara” dalam rangka memilih wakil rakyat atau pejabat publik yang diinginkan. Haryanto (1984:110) dalam tulisannya Laiya dkk (2022) mendefinisikan *voting* sebagai kegiatan warga negara yang memiliki hak pilih yang namanya telah tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan suara dalam rangka menentukan wakil-wakilnya.

Pemberian suara pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan politik yang diberikan oleh pemilih kepada salah satu kontestan atau kandidat. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan bahwa kandidat tersebut mampu membawa aspirasi pemilih, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor yang mendorong lahirnya kepercayaan tersebut antara lain adanya kesesuaian nilai antara pemilih dan kandidat atau partai yang didukung. Nilai yang dimaksud di sini merujuk pada preferensi atau orientasi politik yang dimiliki, baik terkait tujuan yang ingin dicapai maupun cara yang dianggap tepat untuk mencapainya. Oleh karena itu, pemilih akan cenderung memberikan suaranya apabila ia telah memahami dan menerima nilai-nilai yang diperjuangkan oleh calon yang dipilihnya.

Perilaku memilih erat kaitannya dengan bagaimana individu bersikap, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam konteks pemilihan umum. Proses ini tidak hanya mencerminkan pilihan politik seseorang, tetapi juga memperlihatkan tingkat ketertarikan, motivasi, dan orientasi politiknya. Secara umum, perilaku dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma (perilaku normal) dan perilaku yang bertentangan dengan norma (perilaku menyimpang). Dalam konteks politik, perilaku normal adalah perilaku yang mematuhi tata cara dan aturan main demokrasi, seperti memberikan suara secara sah, mengikuti proses kampanye sesuai peraturan, dan menghormati perbedaan pilihan politik. Sebaliknya, perilaku politik menyimpang adalah pola tindakan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku, misalnya melakukan intimidasi

terhadap pemilih lain, penyebaran fitnah politik, politik uang, atau bahkan kekerasan fisik.

Fenomena perilaku menyimpang dalam pemilu sering terlihat dalam bentuk kekerasan politik, seperti bentrokan antarpendukung partai, perusakan atribut kampanye, dan upaya intimidasi terhadap pendukung pihak lawan. Kartini (2010) menjelaskan bahwa perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola yang berlaku di lingkungan sosial tertentu, sehingga menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Sebaliknya, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena melanggar norma yang berlaku, mengganggu ketertiban, atau merugikan pihak lain.

Pendekatan yang lebih luas disampaikan oleh Ramlan Surbakti (Surbakti, 2007) yang mendefinisikan perilaku politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar-lembaga pemerintahan, atau antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Tidak semua individu terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Ada pihak yang memerintah dan ada yang menjalankan perintah, ada yang memengaruhi kebijakan dan ada yang menentangnya, ada yang melakukan negosiasi atau kompromi, dan ada yang melakukan penolakan terhadap keputusan politik yang dianggap merugikan.

Ramlan Surbakti (2015) membagi perilaku politik menjadi dua kategori utama yaitu yang pertama Perilaku politik lembaga dan pejabat pemerintah, yaitu

perilaku aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Selanjutnya yaitu Perilaku politik warga negara atau kelompok masyarakat, yaitu perilaku pihak-pihak yang memiliki hak dan kesempatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, mengingat kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Salah satu bentuk perilaku politik warga negara yang paling menonjol adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga legislatif atau memilih pemimpin eksekutif yang dipercaya mampu mengelola pemerintahan. Melalui perilaku memilih, warga negara tidak hanya menyampaikan aspirasinya, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

Dengan demikian, perilaku memilih dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari partisipasi politik warga negara. Proses ini melibatkan aspek rasional, emosional, dan normatif yang saling berinteraksi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai, preferensi politik, informasi yang diterima, dan kondisi sosial-politik yang berkembang. Dalam kerangka penelitian ini, perilaku memilih dipahami secara spesifik sebagai tindakan pemberian suara (voting) dalam pemilihan umum, yang menjadi salah satu instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Selain itu bagian dari perilaku memilih adalah kecenderungan atau preferensi memilih yang menjadikan kajian ini menarik dalam menganalisis hal tersebut. Perilaku memilih yang diwujudkan dalam preferensi memilih dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya faktor strategi, lingkungan, doktrin dan juga faktor kekaguman terhadap orang yang memberikan secara tidak langsung mengikuti orang tersebut dalam memilih.

2.1.3 Pilkada dan Pilgub

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilihan kepala daerah secara langsung dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 merujuk pada mekanisme pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat, tanpa perantara lembaga perwakilan, sehingga rakyat memiliki kendali penuh dalam menentukan figur pemimpinnya. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa Pemilihan yang meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dimulai pada tahun 2005 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Namun, sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PILKADA dimasukkan dalam rezim pemilu

nasional dan secara resmi disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA).

Dasar hukum pemilihan langsung ini diperkuat oleh amandemen kedua UUD 1945 tahun 2002, khususnya Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Perubahan istilah terjadi lagi pada tahun 2011 dengan diterbitkannya UU Nomor 15 Tahun 2011, yang menghilangkan istilah “pemilu kepala daerah” dan menggantinya menjadi istilah yang langsung menyebut jabatan, seperti pemilihan gubernur (PILGUB), pemilihan bupati (PILBUP), dan pemilihan wali kota (PILWAKOT).

PILGUB adalah salah satu bentuk pemilihan kepala daerah yang khusus dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Pemilihan ini memiliki karakteristik tersendiri karena wilayah cakupannya lebih luas dibandingkan PILBUP atau PILWAKO, melibatkan berbagai kabupaten/kota, serta memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang lebih tinggi. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, PILGUB diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota. Prosesnya meliputi tahapan persiapan, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PILGUB mengikuti asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Keunikan PILGUB juga terletak pada posisi strategis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus kepala pemerintahan daerah provinsi. Oleh karena itu, PILGUB tidak hanya berimplikasi pada pembangunan provinsi, tetapi juga pada

koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Dalam praktiknya, PILGUB sering menjadi ajang kontestasi politik yang sangat kompetitif, melibatkan partai politik besar maupun calon independen. Dinamika PILGUB juga sering mencerminkan peta kekuatan politik nasional, karena hasilnya dapat memengaruhi konfigurasi kekuatan partai pada pemilihan umum berikutnya. Selain itu, PILGUB berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan menguji komitmen kandidat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap aspirasi rakyat.

Dengan demikian, PILGUB sebagai bagian dari pemilihan kepala daerah secara demokratis memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi lokal sekaligus menopang stabilitas politik nasional. Sistem pemilihan langsung yang digunakan memberikan ruang bagi rakyat untuk secara bebas mengekspresikan preferensi politiknya, sehingga kepemimpinan yang lahir dari proses ini diharapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat di tingkat provinsi.

2.1.4 Kewibawaan Tradisional

Kewibawaan tradisional merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang terbentuk melalui interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam interaksi tersebut terdapat pihak yang memberi pengaruh dan pihak yang menerima pengaruh, di mana pihak pemberi pengaruh menyampaikan pesan yang kemudian dijadikan dasar tindakan oleh penerima tanpa melalui proses

evaluasi kritis berdasarkan standar pribadi yang dimilikinya. Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pengaruh tidak bergantung pada pertimbangan rasional semata, tetapi lebih pada hubungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya dan diakui secara bersama (Jackson, n.d.).

Penerimaan terhadap pengaruh dalam kewibawaan tradisional tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar pada hubungan sosial yang telah berlangsung lama dan membentuk persepsi adanya kewajiban timbal balik. Individu yang menerima pengaruh memandang bahwa kepatuhan merupakan bagian dari hubungan tersebut, sehingga tindakan mengikuti arahan pemimpin dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, kewibawaan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keteraturan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Selain itu, kewibawaan tradisional memiliki sifat personal yang kuat karena hubungan antara pemimpin dan pengikut terjalin secara langsung dan tidak bergantung pada aturan formal atau sistem birokrasi. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin bersumber dari pengalaman masa lalu dan perannya dalam kehidupan sosial, seperti sebagai pelindung, pemberi bantuan, dan sumber pengetahuan bagi pengikutnya. Peran-peran tersebut memperkuat legitimasi pemimpin di mata masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang berkelanjutan, sehingga pengaruh yang diberikan dapat diterima tanpa penolakan yang berarti.

Kewibawaan tradisional adalah bentuk kekuasaan yang tumbuh dari tradisi dan hubungan pribadi yang telah terbangun sejak lama. Kekuasaan ini bukan sekadar hasil aturan formal atau imbalan material, melainkan hasil dari reputasi tokoh dan kedekatannya dengan masyarakat. Tokoh yang memiliki kewibawaan tradisional biasanya dihormati karena dianggap sebagai pelindung, penyedia, pendidik, atau bahkan penjaga nilai dan identitas komunitas. Hubungan antara tokoh dan pengikut bersifat personal, emosional, dan moral lebih mirip ikatan keluarga besar daripada kontrak politik.

Ciri khas kewibawaan tradisional adalah ketaatan yang lahir tanpa perlu ancaman atau imbalan materi. Para pengikut tunduk karena merasa memiliki kewajiban moral dan loyalitas, meskipun kadang mereka tidak sepenuhnya setuju dengan ide atau keputusan sang tokoh. Kepatuhan ini berkelanjutan dan sering kali diwariskan lintas generasi. Seorang kyai, misalnya, bisa memobilisasi seluruh desa untuk mendukung gerakan politik tertentu karena masyarakat menghormatinya bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan simbol identitas mereka.

Dalam kajian teori sosiologi, khususnya dalam cabang sosiologi politik, dikenal sejumlah konsep penting seperti *kekuasaan (power)*, *kewenangan (authority)*, *kewibawaan (prestige/legitimacy)*, dan *pengaruh (influence)*. Keempat konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan kapasitas dominasi atau kemampuan untuk menguasai pihak lain. Meskipun secara umum istilah-istilah tersebut menunjuk pada hal yang serupa, yaitu *dominasi* sebagai kekuatan untuk

mengendalikan pihak lain, masing-masing memiliki derajat, fungsi, dan makna yang berbeda.

Secara ideal, kekuasaan senantiasa mengandaikan keberadaan kewenangan, kewibawaan, dan pengaruh di dalamnya. Ketiga unsur tersebut dapat dipandang sebagai penopang utama bangunan kekuasaan. Kewenangan memberikan legitimasi hukum, kewibawaan membangun kepercayaan dan penghormatan, sedangkan *pengaruh* memungkinkan terjadinya kepatuhan yang bersifat sukarela. Namun, dalam kenyataan empiris, kekuasaan tidak selalu ditopang oleh kewibawaan. Terdapat banyak kasus di mana pemegang kekuasaan memiliki kewenangan formal tetapi tidak disertai kewibawaan moral, sehingga hubungan kekuasaan cenderung dijalankan melalui tekanan, paksaan, dan keterpaksaan.

Menurut Miriam Budiarjo (1977), esensi kekuasaan adalah kemampuan untuk memberikan sanksi apabila pihak lain tidak mengikuti kemauan atau perintah pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak disertai kewibawaan dan pengaruh cenderung rapuh, tidak memiliki daya ikat yang kuat, dan rentan menimbulkan resistensi dari pihak yang dikuasai. Sebaliknya, kewibawaan tidak selalu memerlukan kekuasaan formal untuk dapat eksis. Seseorang dapat memiliki kewibawaan tinggi dan mempengaruhi orang lain meskipun ia tidak memiliki kedudukan atau kewenangan formal untuk memberikan sanksi.

Dari sudut pandang sumbernya, kekuasaan beserta kewenangannya umumnya bersandar pada jabatan atau posisi formal yang dilembagakan, seperti

presiden, menteri, gubernur, camat, kepala desa, hingga pimpinan organisasi. Dalam sistem ini, pemegang kekuasaan memiliki hak legal untuk membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan. Akan tetapi, kekuasaan bersifat tidak seimbang pihak yang dikuasai tidak memiliki kapasitas yang sama untuk memberikan sanksi kepada pihak yang berkuasa, kecuali melalui bentuk sanksi sosial seperti pengabaian atau perlawanan pasif.

Sebaliknya, kewibawaan lebih banyak bersumber dari modal simbolik dan modal budaya (*cultural capital dan symbolic capital*) sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdieu. Modal budaya dapat berupa pengetahuan, gelar akademik, keterampilan berkomunikasi, etika, serta prestasi intelektual; sedangkan modal simbolik mencakup gelar kehormatan, status sosial, dan atribut-atribut yang dihormati dalam masyarakat. Kewibawaan juga dapat bersumber dari kemampuan supranatural atau religius, yang dalam tradisi Max Weber sering dikaitkan dengan konsep kharisma. Contoh nyata adalah kewibawaan seorang kiai di hadapan santri atau masyarakat, atau seorang tokoh spiritual di hadapan para pengikutnya.

Kewibawaan tradisional dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat personalistik, yang diperoleh melalui peran historis maupun peran aktual seorang tokoh dalam masyarakat. Tokoh tersebut berperan sebagai penyedia kebutuhan, pelindung, pendidik, sekaligus sumber nilai dan status sosial yang tinggi bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan ketergantungan dengannya. Dalam konsep ini, seorang pemimpin tidak perlu menggunakan ancaman, imbalan, atau aturan formal untuk memengaruhi pengikutnya. Kepatuhan yang muncul bersifat

sukarela, lahir dari rasa hormat dan pengakuan terhadap kedudukan tokoh tersebut, bukan karena persetujuan terhadap ideologi atau program politik yang diusung.

Karl D. Jackson menjelaskan bahwa pengikut sering kali menerima pandangan dan arahan pemimpin tanpa mempertanyakan konsistensi ideologisnya, bahkan ketika terdapat kontradiksi di dalamnya (Jackson, 1990). Dalam situasi ini, pemimpin mampu memainkan aspek psikologis pengikut untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak sepenuhnya kritis terhadap isu politik, melainkan lebih menempatkan kepatuhan pada figur dibandingkan pada substansi gagasan politiknya.

Jackson juga membandingkan kewibawaan tradisional dengan bentuk kekuasaan lain seperti patron-klien atau kekuasaan birokratis modern. Hubungan patron-klien lebih banyak bergantung pada pertukaran jasa atau materi, sedangkan kekuasaan modern biasanya bertumpu pada aturan formal, sanksi, atau persuasi ideologis. Kewibawaan tradisional berbeda ia lebih stabil, bertahan lama, dan berakar pada loyalitas moral serta rasa hormat yang mendalam.

Namun, Jackson juga menyadari bahwa kewibawaan tradisional tidak kebal terhadap perubahan. Modernisasi, masuknya birokrasi negara, pendidikan formal, serta media massa dapat mengikis pengaruh tokoh-tokoh tradisional. Mobilitas sosial dan urbanisasi pun memberi masyarakat alternatif legitimasi di luar figur lokal yang dulu begitu dominan. Meski demikian, dalam konteks Darul Islam di Jawa Barat, Jackson menunjukkan betapa kuatnya peran kewibawaan tradisional dalam membentuk arah politik desa-desa (Jackson, 2023).

Pada bentuknya yang murni, kewibawaan tradisional tidak bertumpu pada imbauan ideologis maupun pada pertimbangan keuntungan pribadi jangka pendek bagi pengikutnya. Hubungan ini dilihat sebagai ikatan yang menghubungkan pemimpin dan pengikutnya dengan generasi terdahulu, sehingga memperkuat kontinuitas tradisi. Ikatan semacam ini dapat ditemukan baik di masyarakat tradisional yang tertutup maupun di masyarakat modern yang lebih terbuka.

Secara konsep, kewibawaan tradisional memiliki kemiripan dengan patronase, karena keduanya bersifat vertikal, asimetris, dan saling bergantung. Dalam hubungan ini, tokoh patron atau pemimpin berperan sebagai perantara penting yang menghubungkan dan memenuhi beragam kebutuhan pengikutnya. Oleh sebab itu, koalisi yang terbentuk melalui kewibawaan tradisional maupun patronase biasanya ditandai dengan keragaman latar belakang pengikut.

Dalam konteks politik, tokoh yang memiliki kewibawaan tradisional dapat mengarahkan pengikutnya untuk mendukung atau menarik dukungan dari suatu organisasi politik. Kesetiaan yang terbangun lebih tertuju kepada pribadi tokoh tersebut daripada kepada jabatan formal atau institusi yang diwakilinya. Hal inilah yang membuat kewibawaan tradisional menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah di lingkungan pesantren.

Dalam literatur Jawa, kewibawaan sering digambarkan dengan ungkapan seperti *sekti tanpa aji*, *nglurug tanpa bala*, dan *menang tanpa ngasorake*. Ungkapan ini menggambarkan kepemimpinan yang tidak bergantung pada kekuatan fisik atau

kekuasaan koersif, melainkan pada kekuatan moral, keteladanan, dan kemampuan mempengaruhi secara halus. Bertolak dari penjelasan tersebut, dalam konteks hubungan kiai dengan santri atau masyarakat, istilah yang tepat untuk menggambarkan kapasitas dominasi seorang kiai adalah *kewibawaan*, bukan *kekuasaan*. Kiai disegani karena keteladanan, pengetahuan agama, dan integritas pribadinya, bukan karena kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber bahwa *kewibawaan*, khususnya yang bersifat kharismatik, mampu memunculkan kepatuhan sukarela tanpa paksaan.

Dengan demikian, meskipun kekuasaan dan *kewibawaan* sama-sama berkaitan dengan dominasi sosial, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kekuasaan berorientasi pada kemampuan memaksa melalui ancaman atau pemberian sanksi, sedangkan *kewibawaan* menekankan pengaruh moral dan kepatuhan sukarela yang lahir dari rasa hormat dan pengakuan. Dalam penelitian ini, fokus akan diarahkan pada *kewibawaan* sebagai variabel utama dalam memahami otoritas kiai di tengah masyarakat, karena sifatnya yang lebih mengedepan. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan paternalistik, figur kiai memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk orientasi dan perilaku politik masyarakat. Menurut Karl D. Jackson (1980), *kewibawaan* dalam masyarakat Indonesia tidak semata-mata lahir dari kekuasaan formal atau jabatan politik, tetapi dari hubungan patron-klien yang bersifat personal dan tradisional. Jackson menjelaskan bahwa dalam sistem sosial seperti ini, seorang tokoh yang dianggap memiliki otoritas moral, spiritual, atau sosial akan menjadi patron yang dihormati

dan diikuti oleh masyarakat (klien), bukan karena paksaan, melainkan karena adanya rasa hormat, kepercayaan, dan ketergantungan moral.

Dalam konteks tersebut, kiai berperan sebagai patron yang memiliki kewibawaan tinggi. Kewibawaan ini bersumber dari pengakuan masyarakat terhadap ketulusan, keilmuan, dan peran sosial kiai sebagai pembimbing spiritual. Kiai tidak hanya dihormati karena keilmuannya dalam bidang agama, tetapi juga karena kemampuannya menjadi teladan moral dan penengah sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pandangan, sikap, dan bahkan pilihan politik seorang kiai sering kali menjadi rujukan penting bagi masyarakat dalam menentukan arah dukungan politik.

Teori kewibawaan Jackson dapat menjelaskan fenomena kemenangan Acep Adang di Desa Cipakat, meskipun wilayah tersebut secara umum merupakan basis dominasi politik Dedi Mulyadi. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Acep Adang di Cipakat dapat dipahami sebagai hasil dari pengaruh kewibawaan para kiai lokal yang memiliki otoritas sosial dan moral tinggi di tengah masyarakat. Masyarakat Cipakat yang memiliki ikatan kultural dan emosional kuat dengan para kiai lebih mempercayai arahan dan pilihan yang direkomendasikan oleh kiai dibandingkan dengan pengaruh politik yang bersifat struktural atau material.

Hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam kewibawaan tradisional menunjukkan pola yang khas dan berbeda dari bentuk kekuasaan lainnya. Kepatuhan yang muncul dalam hubungan ini tidak dibangun melalui argumentasi ideologis atau insentif material, melainkan melalui loyalitas yang mendalam yang

terbentuk dari interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Loyalitas tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya keterikatan sosial yang kuat antara kedua pihak.

Interaksi antara pemimpin dan pengikut lebih menyerupai proses pendidikan daripada perundingan yang bersifat setara. Pemimpin bertindak sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih, sehingga ia memberikan arahan kepada pengikut yang berada pada posisi lebih rendah. Dalam hubungan ini, pengikut menerima arahan sebagai bentuk pembelajaran sosial yang harus diikuti, bukan sebagai hasil dari negosiasi atau pertukaran kepentingan. Pola hubungan ini memperkuat struktur sosial yang menempatkan pemimpin sebagai figur sentral yang dihormati.

Kepatuhan dalam kewibawaan tradisional juga bersifat takzim, di mana pengikut menunjukkan sikap hormat yang tinggi terhadap pemimpin dan cenderung melaksanakan perintah tanpa mempertanyakan isi atau tujuan dari perintah tersebut. Pola ini mencerminkan bentuk kepatuhan yang telah mengakar dalam budaya sosial, sehingga respons terhadap perintah pemimpin menjadi sesuatu yang otomatis. Dalam kondisi ini, pengikut tidak menempatkan diri sebagai pihak yang setara, melainkan sebagai bagian dari struktur yang harus menjaga harmoni melalui kepatuhan.

Di sisi lain, hubungan ini tidak didasarkan pada perhitungan imbalan atau keuntungan pribadi yang bersifat langsung. Pengikut tidak mempertimbangkan adanya pertukaran jasa atau manfaat material dalam setiap tindakan yang dilakukan, karena kepatuhan muncul sebagai konsekuensi dari hubungan sosial yang telah mengakar. Dengan demikian, kewibawaan tradisional berbeda dari sistem yang berbasis pada insentif, karena kekuatannya terletak pada ikatan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kewibawaan tradisional di masyarakat pedesaan menunjukkan pola struktur yang relatif seragam dan dapat ditemukan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang mirip. Struktur ini terbentuk melalui hubungan sosial yang menempatkan pemimpin sebagai figur sentral dalam kehidupan komunitas, baik dalam urusan sosial, ekonomi, maupun politik. Keberadaan pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai simbol stabilitas dalam masyarakat.

Masyarakat pedesaan sering memaknai hubungan sosial dalam kerangka hubungan antara bapak dan anak buah, di mana pemimpin diposisikan sebagai figur yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi. Dalam hubungan ini, pengikut menempatkan diri sebagai pihak yang menerima arahan dan menunjukkan loyalitas sebagai bentuk penghormatan. Pola hubungan ini memperkuat struktur sosial yang bersifat hierarkis dan menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Peran pemimpin sebagai penasihat menjadi salah satu elemen utama dalam struktur kewibawaan tradisional. Masyarakat menjadikan pemimpin sebagai

rujukan utama dalam berbagai persoalan, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemimpin membuat nasihat yang diberikan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pendapat dan tindakan masyarakat, sehingga posisi pemimpin menjadi sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kewibawaan tradisional juga ditopang oleh kemampuan pemimpin dalam memberikan perlindungan kepada pengikutnya. Dalam situasi krisis atau ancaman, pemimpin diharapkan mampu menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu dan melindungi anggota komunitas. Kemampuan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tetapi juga meningkatkan tingkat ketergantungan pengikut terhadap pemimpin, sehingga hubungan yang terbentuk menjadi semakin kuat dan berkelanjutan.

Modal kultural seperti garis keturunan pesantren, pendidikan agama, reputasi sosial, dan jaringan alumni merupakan sumber daya simbolik. Namun modal tersebut belum dapat disebut sebagai kewibawaan sebelum memperoleh pengakuan sosial. Kewibawaan muncul ketika masyarakat secara kolektif memberikan legitimasi moral dan menjadikan figur tersebut sebagai rujukan utama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dalam penelitian ini kewibawaan tidak disamakan dengan modal kultural, melainkan dipahami sebagai hasil dari pengakuan sosial atas modal tersebut.

Kewibawaan kiai di Desa Cipakat menjadi sumber legitimasi moral dan simbolik bagi Acep Adang. Dukungan yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama

tersebut dianggap sebagai bentuk restu dan pembenaran moral terhadap calon yang mereka dukung. Dalam sistem sosial patronal sebagaimana dijelaskan Jackson, masyarakat cenderung menempatkan kepercayaan kepada figur yang memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Oleh sebab itu, meskipun Dedi Mulyadi memiliki pengaruh politik yang kuat secara struktural dan administratif, kehadiran kiai dengan kewibawaannya mampu membentuk kekuatan sosial alternatif yang berpengaruh terhadap hasil elektoral di tingkat lokal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih mempertahankan struktur sosial tradisional dan nilai-nilai religius, kewibawaan kiai lebih dominan dibandingkan kekuatan politik formal. Dukungan masyarakat kepada Acep Adang di tengah dominasi Dedi Mulyadi bukan hanya merupakan pilihan politik rasional, tetapi juga bentuk loyalitas sosial dan spiritual terhadap patron yang mereka hormati. Dengan demikian, teori kewibawaan Karl D. Jackson mampu menjelaskan bagaimana hubungan patron-klien antara kiai dan masyarakat di Desa Cipakat menjadi faktor penting dalam kemenangan Acep Adang. Legitimasi moral dibandingkan kekuatan koersif.

Dalam penelitian ini teori kewibawaan tradisional diposisikan sebagai teori utama untuk menjelaskan fenomena dominasi suara di Desa Cipakat. Teori perilaku pemilih digunakan sebagai teori pendukung untuk melihat implikasi kewibawaan terhadap tindakan voting masyarakat.

Dalam konteks politik formal, kewibawaan tradisional berinteraksi dengan sistem kepartaian yang bersifat kompetitif, sehingga menciptakan dinamika yang

kompleks dalam perilaku politik masyarakat. Interaksi ini menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional tetap memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun masyarakat telah terlibat dalam sistem politik modern yang berbasis pada pemilihan umum dan partai politik.

Loyalitas terhadap partai politik dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh struktur kewibawaan tradisional yang ada. Pengikut cenderung mengikuti pilihan politik pemimpin yang mereka hormati, sehingga afiliasi politik tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan ideologis atau program partai. Dalam kondisi ini, hubungan personal antara pemimpin dan pengikut menjadi faktor utama yang menentukan arah pilihan politik masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tekanan silang ketika terdapat perbedaan arahan dari pemimpin yang berbeda dalam jaringan sosial yang mereka miliki. Situasi ini terjadi ketika individu berada dalam lebih dari satu lingkaran kewibawaan, sehingga harus memilih antara berbagai pengaruh yang saling bertentangan. Tekanan ini dapat memengaruhi konsistensi pilihan politik dan menciptakan ketegangan dalam proses pengambilan keputusan.

Identifikasi terhadap pemimpin puncak dalam suatu komunitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap individu yang memiliki pengaruh paling besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Individu tersebut biasanya menjadi rujukan utama dalam berbagai keputusan penting dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan tindakan kolektif dalam skala yang luas. Keberadaan pemimpin puncak ini menunjukkan bahwa kewibawaan tradisional tetap menjadi faktor

penting dalam membentuk orientasi politik masyarakat di tingkat lokal, bahkan di tengah perkembangan sistem politik modern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode	Temuan	Posisi
Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Madiun	Prasetya A (2018)	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	a) Proses demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah belum berjalan optimal sesuai tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat. b) Terjadi polarisasi pendukung yang dilakukan oleh elite politik dan partai, yang memaksa pemilih mengikuti kehendak pimpinan dengan imbalan tertentu. Perilaku politik pemilih sering kali tidak murni berasal dari hati nurani, tetapi dipengaruhi tekanan dan transaksi politik. c) Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai ucapan, perilaku, dan interaksi calon wali kota serta respon pemilih dalam proses Pilkada.	Penelitian tersebut relevan karena sama-sama mengkaji perilaku politik pemilih dalam pemilihan kepala daerah, namun penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada peran kewibawaan tradisional kyai pesantren dalam membentuk preferensi politik masyarakat, khususnya di Pesantren Cipasung pada Pilgub Jawa Barat 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda dengan memusatkan perhatian pada faktor kultural dan religius dalam perilaku

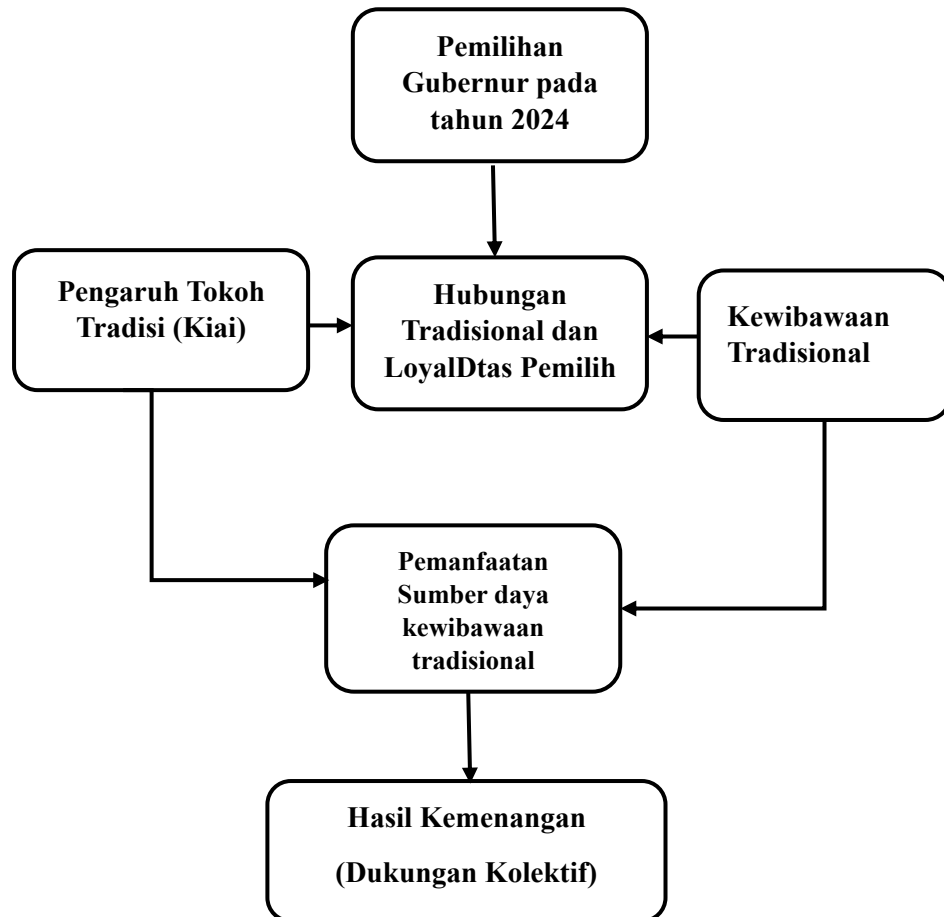
				politik masyarakat pesantren.
Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018	Meilinda (2021)	Kuantitatif, desain penelitian survei (<i>explanatory research</i>)	a) Terdapat hubungan signifikan antara orientasi program pemilih milenial dengan preferensi politik mereka dalam Pilkada Kota Padang 2018, dengan koefisien korelasi 0,443 dan nilai Sig. (2-tailed) 0,000. b) Pemilih milenial tidak hanya menentukan pilihan secara rasional, tetapi juga dipengaruhi faktor sosiologis dan psikologis. c) Orientasi terhadap program pasangan calon menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi preferensi politik mereka.	Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik pemilih. Namun, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran kewibawaan tradisional kyai dalam membentuk preferensi politik masyarakat pesantren, yang cenderung mengarah pada faktor kultural dan religius, berbeda dari fokus pemilih milenial yang lebih rasional dan berbasis program.

Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019	Bayu, (2020)	Mix Metod yaitu menggunakan Kualitatif dan kuantitatif	a) Pemilih pemula cenderung memilih pasangan calon presiden/wakil presiden yang memiliki karakter akurat, faktual, terpercaya, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak kerja nyata. b) Debat capres/wapres memiliki peluang besar untuk memengaruhi elektabilitas calon dan meyakinkan preferensi pemilih pemula.	Penelitian ini relevan karena membahas faktor pembentuk preferensi pemilih, namun fokusnya pada pemilih pemula dan pengaruh media debat politik. Penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti pengaruh kewibawaan tradisional kyai terhadap preferensi politik masyarakat pesantren, yang berbasis nilai-nilai kultural dan religius, bukan media politik formal.
--	---------------------	---	---	--

Strategi Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution Dan Atika Azmi Utammi Nasution Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. (Rusdi, A., 2022)	Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi	Pasangan calon Jakfar dan Atika melakukan Strategi seperti, pendekatan kepada tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda, dan akademisi. Mengoptimalkan kerjasama tim pemenang dan tim partai Politik sebagai mesin Politik. Melakukan kampanye yang sesuai dengan kebudayaan atau kearifan lokal Masyarakat. Dan melakukan pendekatan kepada anak-anak muda atau kaum Milenial	Pendekatan kepada tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum milenial menjadi aspek yang serupa.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang kemenangan calon dalam pemilihan sedangkan perbedaannya yaitu pada pendekatan yang digunakan dimana penelitian ini lebih umum dalam menjelaskan strategi kemenangan tetapi penelitian saya berfokus pada kewibawaan kiai dalam kemenangan.
--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini berangkat dari pandangan Karl D. Jackson mengenai kewibawaan tradisional sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku politik masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan. Kewibawaan tradisional merujuk pada otoritas yang bersumber dari tradisi, nilai-nilai lokal, dan hubungan yang telah lama terbentuk antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan ini bersifat personal, emosional, dan mengandung ikatan moral yang membuat pengikut merasa memiliki kewajiban untuk patuh, bukan karena dorongan materi, melainkan karena rasa hormat dan kepercayaan.

Kewibawaan tersebut kemudian melahirkan hubungan tradisional dan loyalitas pemilih. Dalam hubungan ini, warga melihat tokoh berwibawa bukan hanya sebagai figur sosial, tetapi juga sebagai panutan moral dan pelindung. Loyalitas ini membentuk kecenderungan untuk mengikuti arahan tokoh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pilihan politik. Selanjutnya, pengaruh tokoh tradisi seperti kiai menjadi faktor penggerak yang konkret. Tokoh agama atau adat sering kali menjadi pusat rujukan keputusan politik masyarakat. Rekomendasi atau dukungan yang diberikan oleh tokoh tersebut memiliki bobot yang tinggi di mata warga, bahkan dapat mengesampingkan pertimbangan rasional terhadap visi, misi, atau program kandidat yang bersaing. Gabungan dari loyalitas yang lahir dari hubungan tradisional dan pengaruh tokoh tradisi membentuk preferensi pemilih. Preferensi ini cenderung bersifat kolektif, terutama di komunitas yang homogen dan memiliki ikatan sosial kuat. Dalam kondisi seperti itu, pilihan politik warga akan relatif seragam, mengikuti garis yang ditetapkan atau disarankan oleh tokoh berwibawa. Pada akhirnya dari kecendrungan tersebut memberikan dominasi suara dan juga kemenangan pada pilgub 2024 pada di desa Cipakat.